

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pariwisata berperan besar terhadap pembangunan nasional dan menjadi aset negara karena dapat menghasilkan pendapatan bagi daerah dan penghasil devisa negara secara cepat. Sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi, pariwisata mampu menciptakan lapangan pekerjaan, memajukan sektor industri, dan secara langsung berkontribusi bagi kemajuan usaha perbaikan infrastruktur daerah seperti pelabuhan, pengangkutan, jalan raya, serta mendorong keberhasilan dalam program pelestarian lingkungan, proyek sarana budaya, dan lainnya yang bermanfaat untuk masyarakat atupun para wisatawan.

Berdasarkan Data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, sektor pariwisata pada tahun 2022 menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) dari 2,4% pada 2021 menjadi 3,6%, peningkatan nilai devisa pariwisata 2022 dari 0,52 miliar dolar AS pada 2021 menjadi 4,26 miliar dolar AS. Peningkatan kontribusi tersebut karena didukung dengan adanya upaya pengembangan pariwisata. Pengembangan pariwisata merupakan strategi untuk memajukan, memperbaiki, dan menumbuhkan daya tarik wisata agar dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan sehingga masyarakat dan pemerintah dapat merasakan dampak positifnya. Dari berbagai daerah di Indonesia, hampir seluruhnya berupaya untuk melakukan pengembangan setiap sektor pariwisata yang dimilikinya. Hal ini juga yang dilakukan oleh salah satu kabupaten di Indonesia yaitu Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Gunungkidul tahun 2021-2026, salah satu yang menjadi tujuan dari Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul yaitu “Terwujudnya Pembangunan Ekonomi Kerakyatan dan Peningkatan Investasi” dengan sasaran Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian masyarakat meningkat dengan indikatornya adalah Meningkatkan dan pengembangan potensi pariwisata dan kebudayaan.

Kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten yang berada di Provinsi D.I Yogyakarta dengan jumlah potensi wisata yang cukup banyak dan sangat memperhatikan setiap obyek wisata yang ada, baik di daerah pedesaan atau daerah perkotaan, sehingga keunikan pariwisatanya lebih terjaga, mulai dari obyek wisata pantai, goa/song, hutan dan bukit, sungai, serta pegunungan. Salah satu obyek wisata yang menjadi pusat perhatian para wisatawan adalah wisata Goa Pindul.

Goa Pindul disebut sebagai goa kapur dengan kedalaman sekitar 5-12 meter. Di dalam goa, terdapat sungai bawah tanah yang membentang sekitar 350 meter dan mengalir di sepanjang Goa Pindul. Wisata Goa Pindul cukup berbeda dari wisata goa lainnya karena tidak saja memberikan keeksotisan goa semata, tetapi juga memberikan pemandangan air sungai bawah tanah yang indah yang berasal dari mata air gedong tujuh dan menawarkan wisata *cave tubing* atau penelusuran goa dan beberapa objek wisata menarik yang menjadi modal utama dalam pengembangan wisata Goa Pindul seperti, Sungai Goa Pindul, Batu Tirai, Batu Soko Guru merupakan batu stalaktit yang paling besar di Goa Pindul, Batu Stalaktit Mutiara, Batu Stalagmit Perkasa, dan Cahaya Surgai/Sumur Terbalik.

Wisata Goa Pindul dinobatkan sebagai salah satu destinasi wisata terbaik di Kabupaten Gunungkidul melalui perolehan berbagai penghargaan seperti Penghargaan Juara I Desa Wisata Terbaik tingkat DIY Tahun 2012 dan memperoleh Penghargaan Juara 1 *LOS Award* 2014 dari LOS (Lembaga Ombudsman Swasta) Daerah Istimewa Yogyakarta dalam kategori Desa Wisata terbaik 2014 (Anjar, 2018). Berdasarkan Laporan Realisasi PAD Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023, PAD yang dihasilkan dari pengembangan wisata Goa Pindul bisa mencapai lebih dari Rp 1 Milyar setiap tahunnya.

Untuk memperoleh PAD yang cukup besar tersebut, tentu diperlukan daya dukung yang optimal dan ini menjadi salah satu aspek yang sangat penting. Daya dukung yang dibutuhkan tidak hanya daya dukung lingkungan saja, tapi juga daya dukung yang berkaitan dengan modal, fasilitas umum, sarana, prasarana, dan aksesibilitas. Dan tidak kalah penting yaitu sinergitas antar daerah dalam pengembangan pariwisata. Tanpa ketersediaan daya dukung dengan baik, wisata Goa Pindul tidak bisa melakukan pengembangan yang optimal.

Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul melakukan suatu upaya strategis guna menunjang pengembangan wisata Goa Pindul yaitu dengan memperkuat peluang, merubah cara promosi dari manual menjadi berbasis teknologi informasi, tetap memenuhi tanggungjawab terhadap lingkungan hidup dan sosial budaya serta meningkatkan kemitraan usaha pariwisata karena kegiatan pengembangan wisata Goa Pindul ini tidak dapat dilakukan jika hanya satu pihak saja yang terlibat di dalamnya. Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul melakukan

kerjasama dengan beberapa pihak mulai dari Pemerintah Desa, swasta, dan masyarakat sebagai wujud pelayanan publik dan untuk menciptakan pengembangan pariwisata yang optimal untuk keberhasilan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul khususnya wisata Goa Pindul.

Konsep kerjasama yang digunakan dalam pengembangan wisata Goa Pindul mengacu pada konsep *Collaborative Governance*. Menurut pendapat Ansell dan Gash (2008), *collaborative governance* merupakan pemerintahan yang satu atau beberapa organisasi publik di dalam proses pengambilan keputusan formal yang berorientasi kepada konsensus dan musyawarah dengan tujuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik dan mengelola program atau asset publik (Mutiarawati & Sudarmo, 2021). Terlepas dari penghargaan yang diperoleh dan kontribusi PAD yang cukup besar yang diberikan oleh wisata Goa Pindul kepada Daerah Kabupaten Gunungkidul, faktanya pengembangan wisata Goa Pindul masih menyisihkan beberapa permasalahan dikarenakan pelaksanaan kolaborasi yang belum berjalan dengan maksimal.

Indikasi permasalahan pertama adalah rendahnya komitmen para aktor di dalam pelaksanaan pengembangan wisata Goa Pindul. Dari hasil pengamatan pra penelitian yang dilakukan melalui observasi, infrastruktur dan kebersihan di wisata Goa Pindul menunjukkan kondisi yang kurang layak. Infrastruktur merupakan sarana dan prasarana pembangunan yang memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk menikmati dan mengakses wisata secara aman dan nyaman termasuk akses jalan, gedung, dan sebagainya.



Gambar 1.1 Kerusakan Akses Jalan Wisata Goa Pindul

Sumber: Diolah Peneliti

Akses lokasi menunjukkan keadaan yang kurang layak. Jalan yang dilewati untuk menuju wisata Goa Pindul mengalami kerusakan parah. Dapat dilihat dari gambar 1.1, terdapat lubang yang cukup dalam dan terdapat genangan air. Tentu hal ini dapat membahayakan dan mengganggu para wisatawan yang melewati jalan tersebut. Padahal semestinya, jalan menjadi akses yang memudahkan para wisatawan untuk menuju lokasi wisata dan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan pengembangan wisata.



Gambar 1.2 Masalah Kebersihan di Wisata Goa Pindul

Sumber: Diolah Peneliti

Berdasarkan gambar 1.2, kondisi aliran sungai wisata Goa Pindul terdapat beberapa sampah baik itu sampah organik (daun-daun kering) maupun sampah non organik (plastik dan bekas masker). Selain dapat menimbulkan penilaian yang buruk bagi wisatawan, keberadaan sampah tersebut juga secara langsung dapat merusak air sungai di Goa Pindul.

Penjelasan dari Ketua Pokdarwis Dewa Bejo selaku pramuwisata di wisata Goa Pindul dalam wawancara pra penelitian menjelaskan bahwa:

“jalan dan sampah memang masih menjadi masalah yang seringkali kita bahas, sampai saat ini masih seperti itu. Salah satunya ya karena dari komitmen para pemangku kepentingan sendiri masih kurang padahal yang namanya komitmen itu sangat penting dalam melakukan pengembangan wisata dan kerjasama.” (Wawancara pra penelitian 10 November 2022)

Hal tersebut juga didukung dari penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh Faturachman, Irma, dan Tarifu (2022) dengan judul “Tata Kelola Kolaboratif (*Collaborative Governance*) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi”, salah satu *collaborative governance* yang berjalan dengan baik yaitu adanya komitmen dari setiap *stakeholders* dengan menyadari peran dan tanggungjawabnya masing-masing

Indikasi permasalahan kedua yang muncul yaitu tidak tercapainya target jumlah kunjungan dan penghasilan asli daerah (PAD) wisata Goa Pindul. Berikut ini merupakan data realisasi capaian jumlah kunjungan dan PAD wisata Goa Pindul enam tahun terakhir dari tahun 2016-2021 sejak dilakukannya kolaborasi.

**Tabel 1.1 Realisasi Pengunjung dan Pendapatan Asli Daerah
Wisata Goa Pindul Tahun 2016-2021**

Tahun	Target		Realisasi		%
	Pengunjung	PAD (Rp.)	Pengunjung	PAD (Rp.)	
2016	160.000	1.600.000.000	174.097	1.740.970.000	108,8
2017	142.000	1.420.000.000	145.081	1.450.810.000	102,2
2018	160.000	1.520.000.000	114.611	1,088.183.500	71,6
2019	172.000	1.634.000.000	135.751	1.289.634.500	78,9
2020	62.784	596.448.000	34.979	332.300.500	55,7
2021	13.500	128.250.000	20.804	197.638.000	154,1

*Sumber: Diolah Peneliti dari Data Kunjungan dan Realisasi PAD Dinas
Pariwisata Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023*

Tabel 1.1 menunjukkan kondisi dimana pada tahun 2016, realisasi pengunjung dan PAD wisata Goa Pindul mampu melebihi target yang ditetapkan dengan persentase capaian 108,8%. Tahun 2017-2020, persentase realisasi pengunjung dan PAD cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Tahun 2017, persentase realisasi capaian target sebesar 102,2%, kemudian di tahun 2018 mengalami penurunan menjadi 71,6%, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 78,9%, dan di tahun 2020 mengalami penurunan drastis menjadi 55,7%. Bahkan persentase realisasi capaian target dari tahun 2018-2020 tidak memenuhi target 100%. Kemudian di tahun 2021 mengalami peningkatan menjadi 154,1%.

Tabel 1.2 Daftar Pramuwisata di Desa Bejiharjo

No.	Pramuwisata di Desa Bejiharjo
1.	Dewa Bejo (Pokdarwis)
2.	Kelompok Panca Wisata
3.	Kelompok Wira Wisata
4.	Kelompok Tunas Wisata
5.	Kelompok Karya Wisata
6.	Kelompok Mriwis Putih
7.	Kelompok Sadam Wisata

No.	Pramuwisata di Desa Bejiharjo
8.	Kelompok Gelaran Indah Wisata
9.	Kelompok Ngancar Wisata
10.	Kelompok Sumber Banyu Moto
11.	Kelompok Tiga Tugu Abadi

Sumber: Diolah Peneliti dari Data Kelompok Desa Bejiharjo Tahun 2022 di BUMDes Maju Mandiri

Berdasarkan tabel 1.2, terdapat sebelas pramuwisata di Desa Bejiharjo yang di antara satu dari kesebelas kelompok tersebut merupakan kelompok perintis sekaligus kelompok inti yaitu Pokdarwis Dewa Bejo. Sejak Goa Pindul menjadi objek wisata di tahun 2011, mulai banyak kelompok baru yang muncul yang melibakan diri dalam pengembangan wisata Goa Pindul, tetapi hal tersebut sampai saat ini masih menjadi permasalahan karena memicu munculnya perselisihan di antara kelompok satu dengan kelompok lainnya.

Indikasi permasalahan ketiga dimana terjadi persaingan tarif yang tidak sehat di antara kelompok satu dengan lainnya. Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, beberapa kelompok memberikan harga tiket di luar kesepakatan. Dilansir dari *harianjogja.com*, perang tarif sering sekali terjadi dimana jasa susur goa dihargai lebih tinggi. Bapak Wasimin selaku Kepala Urusan Pangripto Kalurahan Bejiharjo berpendapat:

“di Goa Pindul itu kan terdiri dari 11 kelompok dan dalam sebuah wisata itu pasti berlomba-lomba untuk mendapatkan pemasukan dan itu sudah biasa apalagi ada persaingan tarif. Tapi karena ini sudah ada kesepakatan yang akhirnya menjadi masalah. Yang kelompok B menjual lebih mahal dibanding kelompok A tujuannya untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Dan kalau terlalu mahal akhirnya merusak harga pasaran dan ini kan bisa membuat pemikiran pengunjung kalau harganya semua segitu.”
(Wawancara pra penelitian 10 November 2022)

Dengan adanya permasalahan yang telah dipaparkan, peneliti berharap dapat mengidentifikasi *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dengan menggunakan model *collaborative governance* Ansell dan Gash (2008). Analisis terhadap kolaborasi dalam pengembangan wisata Goa Pindul perlu dilakukan karena selain untuk memperbaiki hubungan kolaborasi di wisata Goa Pindul, hal ini juga bisa saja terjadi di tempat wisata lain dan tidak menutup kemungkinan dengan adanya permasalahan-permasalahan yang muncul dapat memunculkan permasalahan baru yang bahkan lebih besar dan apabila permasalahan semacam ini terus menerus terjadi, lambat laun akan menurunkan citra wisata Goa Pindul dan pariwisata di Kabupaten Gunungkidul serta menurunkan minat kunjungan wisatawan.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Adanya komitmen yang kurang di antara pemangku kepentingan dalam melakukan pengembangan wisata Goa Pindul.
2. Tidak tercapainya target jumlah kunjungan dan penghasilan asli daerah (PAD) wisata Goa Pindul.
3. Adanya persaingan tarif yang tidak sehat di antara kelompok satu dengan lainnya dengan menaikkan harga di atas harga yang telah disepakati.

1.3. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul?

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan dan menganalisis *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.5. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan bisa memberikan berbagai manfaat, baik manfaat akademis, teoritis maupun manfaat praktis.

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Program Studi Sarjana Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial

dan Ilmu Politik serta mendorong peningkatan pada kemampuan berpikir secara ilmiah, kritis, sistematis bagi penulis dan menciptakan karya tulis ilmiah atas dasar kajian teori.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Perusahaan/Instansi

Hasil penelitian diharapkan bisa dimanfaatkan sebagai acuan maupun referensi bagi instansi/lembaga/pihak terkait yang berkepentingan saat menjalankan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

2) Bagi Peneliti Selanjutnya

Diharapkan bisa menjadi bahan referensi dalam melakukan sebuah penelitian dengan permasalahan yang sejenis maupun penelitian dengan permasalahan baru untuk memperluas pemahaman.

c. Manfaat Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan bisa memberikan kontribusi ilmu pengetahuan yang mendalam untuk kajian mengenai *collaborative governance*, memperkuat penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

1.6. Kerangka Pemikiran Teoritis

1.6.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu akan menjadi salah satu referensi dan acuan bagi penulis dalam melakukan penelitian agar penulis bisa mengeksplor dan memperoleh informasi yang relevan untuk mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis tidak menemukan adanya penelitian yang memiliki judul serupa atau sama seperti judul penelitian yang penulis gunakan. Berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang berasal dari beberapa artikel jurnal terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Tika Mutiarawati dan Sudarmo (2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan	Mengetahui tata pemerintahan kolaboratif antara para pemangku kepentingan dalam menyelesaikan banjir pasang surut di Kelurahan Bandengan dan untuk mengetahui faktor yang menghambatnya.	Penelitian kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan dengan wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. Teknik <i>purposive sampling</i> . Validasi data menggunakan metode triangulasi sumber data.	Para pemangku kepentingan telah berkolaborasi secara intensif. Pertemuan kolaborasi menunjukkan belum sukses karena kurangnya kepercayaan pemangku kepentingan, tata pemerintahan yang buruk, tidak cukupnya sumber daya dan keseimbangan distribusi akuntabilitas dan tanggungjawab. Berbagai faktor menghambat kolaborasi yang melibatkan perspektif berbeda dalam hal keegoisan, tingkat kesadaran rendah, dan ketidakpercayaan antar pemangku kepentingan, ketidakseimbangan akuntabilitas, tanggungjawab, dan SDM, teknis dan keuangan yang	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan : Lokus penelitian, Teknik observasi. Tema penelitian, Penelitian terdahulu menggunakan teori <i>collaborative governance</i> DeSeve.

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
					tidak memadai.	
2.	Faturachman Alputra Sudirman, dan Irma Tri Annisya Tombora, dan La Tarifu (2022)	Tata Kelola Kolaboratif (<i>Collaborative Governance</i>) Pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi	Menggambarkan proses tata kelola kolaboratif pembangunan Pariwisata Bajo Mola Wakatobi yang melibatkan aktor negara dengan non negara.	Kualitatif dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi serta analisis data dengan konsep <i>collaborative governance</i> oleh Ansell dan Gash (2008).	Proses <i>collaborative governance</i> pembangunan pariwisata di Bajo Mola terlaksana dengan baik yang melibatkan, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kab.Wakatobi, Bank Mandiri, British Council, masyarakat dan Lembaga Pengelola Wisata Bajo Mola, berbagai aktor negara dan non negara. Diawali dengan adanya dialog tatap muka, membangun kepercayaan sehingga mendapatkan hasil sementara antara lain: peningkatan kualitas masyarakat terhadap pengelolaan sampah, usaha wisata, dan meningkatkan penghasilan masyarakat.	Manfaat: Sebagai referensi penulis dalam menentukan gap penelitian, menjadi referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> dan metode penelitian yang digunakan. Perbedaan; Lokus penelitian, Teknik observasi, Penelitian terdahulu hanya menganalisis dimensi proses <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash.

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
3.	Retno Susilowati, Khairunnas, Khairunnas, Rahmat Rafinzar, Maudy Noor Fadhlia (2022)	Analisis <i>Collaborative Governance</i> dalam Penyelenggaraan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa Sungai Rambutan	Menganalisis penyelenggaraan Musrenbangdes dalam perspektif <i>collaborative governance</i> dan menggambarkan model aksi kolaborasi yang dapat diterapkan dalam penyelenggaraan Musrenbangdes.	Metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam dengan <i>key informan</i> , observasi, dan tinjauan pustaka.	Penyelenggaraan Musrenbangdes di Desa Sungai Rambutan belum maksimal. Minimnya sosialisasi dan pengetahuan terkait Musrenbangdes berdampak terhadap rendahnya partisipasi masyarakat dan tidak terselenggaranya serap aspirasi dalam bentuk musyawarah bertingkat dari level dusun, selain itu juga terkendala ketersediaan anggaran dalam mengakomodir mayoritas usulan pembangunan fisik.	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> , metode penelitian Perbedaan: Penelitian terdahulu menggunakan teori <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash yang menguraikan aspek <i>Face to face</i> yang diikuti dengan proses negosiasi dan proses konsensus.
4.	Meriwijaya (2016)	Resolusi Konflik Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis	Menggambarkan dan menganalisa tentang konflik dan resolusi konflik yang	Pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari	Konflik pengelolaan atas wisata Goa Pindul disebabkan adanya struktur ekonomi yang membuka peluang bagi aktor yang	Manfaat: Sebagai referensi untuk menemukan permasalahan terkait kolaborasi dalam

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
		Masyarakat (Studi Kasus Pengelolaan Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karang Mojo, Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016)	terjadi dalam pengelolaan obyek wisata Goa Pindul.	studi kepustakaan, observasi, dokumentasi dan wawancara.	berkepentingan, ketiadaan regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan di Kab. Gunungkidul dan adanya pemahaman yang berbeda mengenai sistem kepemilikan tanah yang bisa dimiliki secara pribadi oleh masyarakat.	pengembangan wisata Goa Pindul. Perbedaan: Fokus penelitian dan teori yang digunakan.
5.	Aninda Diah Maharani Utami, Dyah Hariani, dan Susi Sulandari (2021)	<i>Collaborative Governance</i> dalam Pengembangan Desa Wisata Kemetul, Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang	Mengetahui analisis <i>collaborative governance</i> dan faktor penunjang keberhasilan dalam pengembangan Desa Wisata Kemetul.	Deskriptif kualitatif. Teknik <i>purposive sampling</i> . Menggunakan teknik wawancara, observasi langsung, dokumentasi.	<i>Collaborative governance</i> masih menemui banyak kendala, dibuktikan dengan analisis model <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash, yaitu terkait: ketegasan pada aturan, pemahaman bersama terhadap visi dan misi kolaborasi, kurangnya partisipasi dan komitmen. Faktor pendukung keberhasilan kolaborasi,	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> , metode dan teori penelitian yang digunakan. Perbedaan: Lokus penelitian, Teknik observasi, Penelitian terdahulu tidak menguraikan faktor yang

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
					yaitu: kuatnya kepercayaan, keberadaan aturan kolaborasi, terdapat pembagian kewajiban, terdapat informasi dan sumber daya. Untuk indikator tidak terpenuhi seperti: komitmen, struktur jaringan, dan tata kelola yang jelas.	mendukung dan menghambat.
6.	Mirjam de Koning, Tin Nguyen, Michael Lockwood, Sinnason Sengchanthavong, dan Souvanhpheng Phommasane (2017)	<i>Collaborative Governance of Protected Areas: Success Factors and Prospects for Hin Nam No National Protected Area, Central Laos</i>	Menilai tata kelola Kawasan Lindung Nasional No Hin Nam di Laos Tengah untuk melihat kondisi pendukung keberhasilan <i>collaborative governance</i> .	Pendekatan kualitatif-metode campuran. Menggunakan tinjauan pustaka, kuesioner, wawancara.	Tahapan proses <i>collaborative governance</i> oleh Franks dan Booker (2015) terdiri dari Prakondisi, Pendirian dan Pemeliharaan. Tahap Prakondisi-Sejarah kerjasama, aturan pengelolaan SDA lokal diabaikan dan tidak ada pendelegasian wewenang, terbatasnya SDM dan keuangan pemerintah Laos. Tahap Pendirian-Akses informasi, analisis <i>stakeholders</i> yang baik, membangun institusi yang	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> . Perbedaan: Lokus penelitian, metode penelitian, Tema penelitian, Penelitian terdahulu menggunakan teori <i>collaborative governance</i> Franks dan Booker.

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
					ada, menetapkan perjanjian formal, dialog tatap muka, membangun kepercayaan, membangun komitmen dan pemahaman bersama. Tahap Pemeliharaan-Pendekatan adaptif, penilaian reguler, tindakan afirmatif, kenali kinerja yang baik. <i>Collaborative governance</i> di Hin Nam No menggambarkan sistem pemerintahan yang lebih demokratis yang didasarkan pada hak adat dan terdesentralisasi.	
7.	Inayat Ullah, dan Dong-Young Kim (2020)	<i>A Model of Collaborative Governance for Community-Based Trophy-Hunting Programs in Developing Countries</i>	Menguraikan model tata kelola umum dengan mbingkai CBTH.	Menggunakan metodologi metasintetik untuk mengintegrasikan hasil dan studi literatur. Model <i>collaborative governance</i> yang	Kondisi awal yang mendorong CBTH di negara berkembang, adanya kegagalan kebijakan konservasi <i>top down</i> konvensional, persepsi masyarakat lokal tentang manfaat CBTH. Keberadaan kepemimpinan fasilitatif, seperti LSM konservasi	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> . Perbedaan: Lokus penelitian, Metode penelitian., Tema penelitian,

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
				digunakan adalah model Ansell & Gash (2008).	penting dalam memulai CBTH. Kepemimpinan dan instrumental dari masyarakat dan pemerintah dalam menciptakan aturan dasar adalah untuk mendorong adanya komitmen yang kuat dan stabil aktor terlibat dalam proses kolaborasi. Pertemuan tatap muka, membangun kepercayaan, dan adanya hasil sementara untuk menciptakan hasil CBTH yang sukses.	Penelitian terdahulu tidak menguraikan mengenai faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.
8.	Bernhard Fabian Bichler dan Magdalena Losch (2019)	<i>Collaborative Governance in Tourism: Empirical Insights Into a Community Oriented Destination</i>	Mengungkap proses yang mendorong kolaborasi antar pemangku kepentingan.	Pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dengan teknik wawancara semi-terstruktur.	Kepemimpinan, pendorong utama CG dalam mendukung kepercayaan dan komunikasi di antara para aktor. Dialog tatap muka, bagian penting bagi semua aktor. Saling ketergantungan antar aktor mengakibatkan kebutuhan akan pemahaman bersama dan pembangunan	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> . Perbedaan: Lokus penelitian, Metode penelitian, Tema penelitian,

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
					kepercayaan. Pengusaha memanfaatkan jaringan bisnis lokal yang membantu membangun kepercayaan. CG membutuhkan komitmen dari semua pihak dalam tahap implementasi. Keberhasilan CG tergantung pada hasil antara. Hasil antara penting untuk memastikan legitimasi dan memberikan insentif untuk partisipasi masa depan dalam CG.	Penelitian terdahulu menggunakan teori model <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash hanya untuk mengungkapkan faktor yang mendorong terjadinya kolaborasi.
9.	Xabier Barandiarán, Natalia Restrepo and Álvaro Luna (2018)	<i>Collaborative Governance in Tourism: Lessons from Etorkizuna Eraikiz in the Basque Country, Spain</i>	Mendeskripsikan dan merefleksikan nilai <i>collaborative governance</i> dalam proses pengembangan pariwisata melalui analisis program kebijakan publik Basque “Etorkizuna Eraikiz”.	Metode kualitatif. Sumber informasi berasal dari dokumen, studi, dan laporan yang diterbitkan oleh pihak yang bertanggung jawab atas pengembangan	Proses kolaboratif di Gipuzkoa mengadopsi tiga aspek penting dari prinsip-prinsip pendekatan <i>collaborative governance</i> yang dikembangkan oleh Emerson, dkk (2011). Pertama, “ <i>principled engagement</i> ” terjadi dengan penciptaan ruang interaksi antar <i>stakeholders</i> yang terjadi dalam tatap muka,	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> . Perbedaan: Lokus penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan teori proses <i>collaborative</i>

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
				kebijakan pariwisata.	jaringan lintas organisasi, atau pertemuan pribadi dan publik. Kedua, “ <i>shared motivation</i> ” mengacu pada dinamika kolaboratif. <i>Stakeholders</i> membuat komitmen dengan membangun hubungan kepercayaan. Ketiga, “ <i>capacity for joint action</i> ”. Hasil dari proses kesepakatan antara sektor publik, akademisi dan <i>stakeholders</i> tidak hanya terlihat dalam pelaksanaan tindakan pajak dan pemantauan, tetapi juga dalam mengevaluasi potensi.	<i>governance</i> Emerson, dkk dan tidak menguraikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat.
10.	Marijem Djosetro dan Jelle Hendrik Behagel (2020)	<i>Building Local Support for a Coastal Protected Area: Collaborative Governance in the Bigi Pan Multiple Use</i>	Menjelaskan bagaimana tata kelola kolaboratif terbentuk atau tidak.	Menggunakan model Ansell dan Gash untuk menjelaskan bagaimana <i>collaborative governance</i> terbentuk atau	Berbagai konflik penggunaan sumber daya di MUMA menjadi kondisi awal dalam <i>collaborative governance</i> . Ketidakseimbangan organisasi dan kekuasaan antara pengguna sumber daya juga hadir di MUMA. Aturan	Manfaat: Sebagai referensi terkait konsep <i>collaborative governance</i> . . Perbedaan: Lokus penelitian

No.	Peneliti	Judul	Tujuan Penelitian	Metode	Hasil Penelitian	Perbedaan
		<i>Management Area of Suriname</i>		tidak: (1) kondisi awal, (2) desain kelembagaan, (3) kepemimpinan, dan (4) proses kolaboratif melalui interpretasi kualitatif berdasarkan kondisi. Menerapkan wawasan dari Ostrom dan lainnya tentang tata kelola sumber daya alam.	dasar kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat tidak ada. Desain kelembagaan yang dibentuk Kepala Dinas Kehutanan Suriname adalah otoritas manajemen untuk MUMA tetapi Departemen Perikanan LVV yang berhak untuk mengeluarkan izin penangkapan ikan. Berbagai pemangku kepentingan menunjukkan kepemimpinan dengan memobilisasi sumber daya secara kolektif. Proses kolaboratif dibangun di atas sejumlah hasil antara. Ada saling pengakuan saling ketergantungan antara NCD Nickerie dan polisi setempat terkait penegakan hukum.	Teknik observasi partisipan tidak digunakan dalam penelitian ini, Tema penelitian. Penelitian terdahulu menggunakan teori model <i>collaborative governance</i> Ansell dan Gash untuk mengetahui apakah dalam penanganan kawasan lindung telah terbentuk <i>collaborative governance</i> atau tidak

Sumber: Diolah oleh Peneliti dari berbagai sumber

Dapat disimpulkan dari tabel 1.3 bahwa secara umum, penelitian terdahulu memberikan manfaat sebagai referensi untuk mendapatkan informasi terkait konsep *collaborative governance*, metode penelitian dan memberikan informasi dalam menemukan permasalahan yang berkaitan dengan *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul. Yang menjadi pembeda antara beberapa penelitian terdahulu dengan penelitian ini terdapat pada lokus penelitian, tema penelitian, metode penelitian, dan teori penelitian yang digunakan, serta penelitian saat ini menguraikan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat yang mayoritas tidak diuraikan dalam penelitian terdahulu.

1.6.2. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (dalam T. Keban, 2014:4) mendefinisikan administrasi publik sebagai proses mengorganisir dan mengkoordinasikan personel publik dan sumber daya dalam merencanakan, melaksanakan dan mengelola keputusan pada kebijakan publik. Paul H. Appleby (1947) (dalam Edwards, 2017:2) mendefinisikan administrasi publik sebagai "kepemimpinan publik di dalam urusan publik yang secara langsung bertanggungjawab atas tindakan eksekutif". Fenomena administrasi publik lebih bersifat luas dan kompleks dari ilmu manajemen dan ilmu politik karena ilmu administrasi publik bersifat interdisiplin atau multidisiplin. Administrasi publik dituntut untuk bisa memberikan transparansi dan kemudahan masyarakat yang akan mengaksesnya. Administrasi publik juga dipahami sebagai suatu proses administrasi di dalam lembaga

pemerintah yang terdiri dari eksekutif, yudikatif dan legislatif (Dwiyanto, 2018:20-21).

1.6.2.1. Paradigma Administrasi Publik

Seiring dengan perkembangan ilmu administrasi, administrasi telah mengalami pergeseran paradigma. Menurut Nicholas Henry (1975) (dalam T. Keban, 2014:31-33), paradigma administrasi publik terbagi menjadi 6 yaitu :

1. Dikotomi Politik dan Administrasi (1900-1926)

Pemisahan politik dan administrasi dalam paradigma ini digambarkan dengan pemisahan lembaga legislatif yang menyuarakan kehendak rakyat dengan lembaga eksekutif sebagai pelaksana kehendak rakyat tersebut, dan badan lembaga yudikatif sebagai perumus kebijakan. Paradigma Dikotomi Politik dan Administrasi hanya menekankan pada “lokus” semata yaitu birokrasi pemerintah, dan fokus dalam administrasi publik yang seharusnya dikembangkan tidak diperhatikan.

2. Prinsip-prinsip Administrasi (1927-1950)

Tokoh yang terkenal dalam paradigma ke-2 ini adalah Willoughby Gullick dan Urwick yang juga dipengaruhi beberapa tokoh manajemen klasik bernama Fayol dan Taylor yang memperkenalkan sebuah prinsip administrasi POSDCORB (*Planning, Organizing, Staffing, Directing, Coordinating, Reporting, dan Budgeting*) sebagai fokus dari administrasi publik yang universal, sedangkan lokusnya tidak diungkapkan jelas karena prinsip yang ada berlaku dimana saja. Dengan demikian, fokus paradigma ini adalah lokusnya sendiri.

3. Administrasi Negara sebagai Ilmu Politik (1950-1956)

Paradigma ke-3 ini menganggap administrasi publik sebagai ilmu politik dengan lokusnya adalah birokrasi pemerintahan. Fokus dalam paradigma ke-3 menjadi hilang karena prinsip dari administrasi publik memuat banyak kelemahan sehingga terjadi krisis identitas pada administrasi publik karena ilmu politik dalam dunia administrasi publik dipandang sebagai disiplin yang lebih dominan.

4. Administrasi Publik sebagai Ilmu Administrasi (1956-1970)

Fokus pada paradigma ke-4 adalah perilaku organisasi, penerapan teknologi yang modern dan analisis manajemen. Perkembangan arah yang terjadi dalam paradigma ke-4 ini adalah, orientasi pada kebijakan publik dan perkembangan ilmu administrasi murni dengan disiplin psikologi sosial. Seluruh fokus yang dikembangkan diperkirakan bisa diterapkan pada administrasi publik dan bisnis yang akhirnya menyebabkan ketidakjelasan pada lokus.

5. Administrasi Publik sebagai Administrasi Publik (1970-1980)

Fokus dan lokus pada paradigma ke-5 ini sudah jelas. Yang menjadi lokus yaitu kebijakan publik, teori organisasi, dan teori manajemen, sedangkan yang menjadi lokusnya yaitu kepentingan dan masalah publik.

6. *Governance* (1990-sekarang)

Sistem nilai, kelembagaan, dan kebijakan dimana kepentingan sosial, ekonomi, dan politik dilakukan dengan interaksi di antara pemerintah, swasta dan masyarakat. Paradigma *Governance* memprioritaskan prosedur dan proses sehingga masyarakat maupun kelompok bisa mengekspresikan kepentingannya, memediasi adanya perbedaan, dan melakukan apa yang menjadi hak serta

kewajiban masing-masing. Esensi pada paradigma ke-6 yang juga menjadi paradigma terakhir dalam administrasi publik ini memperkuat interaksi ketiga aktor dalam mempromosikan pembangunan yang berpusat pada rakyat.

Sesuai dengan paradigma administrasi publik yang telah diuraikan di atas, penelitian ini menggunakan paradigma keenam yaitu *Governance* yang berfokus pada analisis proses interaksi di antara pihak pemerintah, masyarakat dan swasta di dalam pembangunan dan pelaksanaan sebuah kebijakan, dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya, penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari administrasi publik.

1.6.3. Manajemen Publik

Manajemen publik menurut Hyde, Ott da Shafritz (1990) (dalam Wijaya & Danar, 2017:1) adalah salah satu cabang ilmu administrasi publik yang membahas keilmuan mengenai rancangan program dan penataan kembali organisasi, distribusi sumber daya dengan sistem penganggaran, manajemen SDM, dan penilaian serta audit terhadap program secara khusus. Dapat dikatakan manajemen publik adalah studi yang membahas terkait bagaimana SDM yang ada melakukan aktivitas manajemen terhadap organisasi sektor publik. Manajemen publik berfokus kepada internal organisasi publik, yakni mengatur organisasi sektor publik agar dapat melaksanakan pekerjaan secara optimal dalam pencapaian tujuan.

Manajemen publik juga dapat dikatakan sebagai manajemen pemerintah dan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan publik melalui pemanfaatan sarana dan prasarana yang ada. Manajemen publik harus didasarkan pada “*New Managehalism Public Service*” yang berfokus pada sumber daya manusia, desain spesifik organisasi dan lingkungan masyarakat. Pelayanan publik yang dilakukan manajemen publik bukan pada nilai dan prinsip efisiensi, produktivitas, pemasaran dan pelanggan yang bersifat “*Good Corporate Governance*“, tetapi mempunyai relevansi orientasi pada membangun kepentingan pemerintahan yang baik pada sektor publik, swasta dan masyarakat atau “*Good Governance*“ dengan mengutamakan “*Good Public Governance, Good Corvorate and Good Society*“ (Ibrahim & Supriatna, 2019:57).

Mahmudi (2010:38-40) (dalam Prasetyo, 2017) mengutarakan 7 (tujuh) karakteristik yang menjadi pembeda antara manajemen sektor publik dengan sektor swasta, yaitu antara lain:

1. Keputusan dalam sektor publik didasarkan pada pilihan kolektif dari pemerintahan dan tuntutan publik yang kolektif dapat diutarakan kepada DPR atau partai politik sebagai perwakilan rakyat.
2. Penggerak dalam sektor publik muncul sebagai akibat adanya kebutuhan terhadap sumber daya (air bersih, kesehatan, listrik, pendidikan, transportasi, dan lain-lain) yang merupakan alasan utama bahwa sektor publik harus memenuhinya.
3. Organisasi sektor publik memiliki kewajiban atas keterbukaan informasi publik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

4. Organisasi sektor publik mempunyai kepentingan untuk menciptakan kesempatan ataupun peluang yang sama terhadap setiap lapisan masyarakat dalam usaha memenuhi kebutuhan primer hidupnya.
5. Organisasi sektor publik dihadapkan pada permasalahan keadilan.
6. Masyarakat memegang kekuasaan tertinggi dalam organisasi sektor publik.
7. Dalam sektor publik, yang menjadi instrumen pemerintahan adalah tindakan kolektif sedangkan pada sektor swasta, persaingan atau kompetisi menjadi instrumen pasar.

1.6.3.1. Unsur-Unsur Manajemen Publik

Mahardika (2018) beranggapan bahwa untuk bisa mencapai sebuah tujuan, diperlukan manajemen yang terdiri atas 6 (enam) unsur yang disebut 6M, yaitu:

1. *Man* (Manusia). Sumber daya manusia (SDM) dalam manajemen sangat diperlukan sebagai penggerak, pelaksana, dan tim produksi.
2. *Money* (Uang/Dana). Keuangan adalah nyawa dari keberlangsungan suatu organisasi sebab, tanpa adanya keuangan atau dana, organisasi termasuk organisasi publik tidak dapat berjalan dengan lancar.
3. *Material* (Barang Mentah). Pengolahan barang baku menjadi barang berharga dan bernilai untuk menghasilkan keuntungan bagi organisasi.
4. *Machine* (Mesin). Teknologi dan mesin yang digunakan dalam pengolahan barang mentah yang dimaksudkan untuk memberikan kemudahan, efektivitas, dan efisiensi selama proses.

5. *Method* (Cara/Metode). Metode berkaitan dengan cara yang digunakan untuk kegiatan manajemen yang dinilai efektif untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.
6. *Market* (Tempat). Tempat/lokasi untuk memasarkan hasil produksi agar dapat memuaskan konsumen dan dapat memberikan keuntungan bagi organisasi.

1.6.4. Collaborative Governance

Kata kolaborasi secara epistemologi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*colabour*” = bekerja bersama, sedangkan secara filosofis artinya sebagai upaya berbagai pihak dalam mencapai tujuan yang sama. Donahue dan Zeckhauser (2011:4) (dalam Djani, 2022) mendefinisikan *collaborative governance* sebagai kondisi dimana Pemerintah dalam memenuhi tujuan publik dilakukan melalui kolaborasi antar individu maupun organisasi. Menurut Jamal dan Watt (2011), *collaborative governance* adalah konsep yang mencakup berbagai teori dan praktik, tetapi singkatnya, berdasarkan partisipasi aktif berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam kebijakan pembangunan (Barandiarán, dkk., 2019). Sedangkan *collaborative governance* menurut Jung, dkk., (2009:1) (dalam Kurniasih, dkk., 2017) merupakan proses pada pembentukan, memfasilitasi, mengoperasikan dan mengontrol pengaturan organisasi/lembaga lintas sektoral untuk menyelesaikan masalah publik yang penyelesaiannya tidak bisa dilakukan oleh satu organisasi atau publik saja.

Menurut pendapat Ansell dan Gash (2008) *collaborative governance* merupakan pemerintahan yang satu atau beberapa organisasi publik di dalam proses pengambilan keputusan formal yang berorientasi kepada konsensus dan musyawarah dengan tujuan untuk membuat dan melaksanakan kebijakan publik dan mengelola program atau asset publik (Mutiarawati & Sudarmo, 2021). Ansell dan Gash (dalam Koning, dkk., 2017) juga mengidentifikasi bahwa terdapat enam kriteria pada pengaturan *collaborative governance* yang perlu dimiliki untuk memenuhi definisi mereka, yaitu: 1) forum dimulai oleh otoritas pemerintahan yang sah; 2) peserta dalam forum termasuk aktor pemerintah dan non-negara; 3) peserta terlibat langsung dalam pengambilan keputusan; 4) forum secara formal terorganisir dan bertemu secara kolektif; 5) forum bertujuan untuk membuat keputusan dengan konsensus; dan 6) fokus kerjasama adalah pengembangan dan/atau melaksanakan kebijakan, rencana atau program pengelolaan.

Berbeda dengan Ansell dan Gash (2008), Emerson, Nabatchi, dan Balogh (2012) (dalam Sher-Hadar, dkk., 2020:4) menyajikan definisi yang lebih luas tentang *collaborative governance*. Dalam definisi mereka, inisiatif untuk pemerintahan kolaboratif dapat muncul dari organisasi non-pemerintah. Dan inisiatif tersebut kemungkinan berasal dari masyarakat sipil. Ini dianggap *collaborative governance* karena tujuan mereka adalah untuk mensosialisasikan tujuan publik dan mereka termasuk aktor pemerintah.

Mc. Guire (2006) (dalam Purnomo, dkk., 2018:13) mengartikan *collaborative governance* merupakan bagian dari konsep manajemen pemerintahan yang pelaksanaannya dilakukan oleh berbagai lembaga atau

organisasi baik pemerintah, NGOs, ataupun masyarakat untuk mengatasi masalah bersama yang tidak bisa terselesaikan jika hanya satu pihak saja.

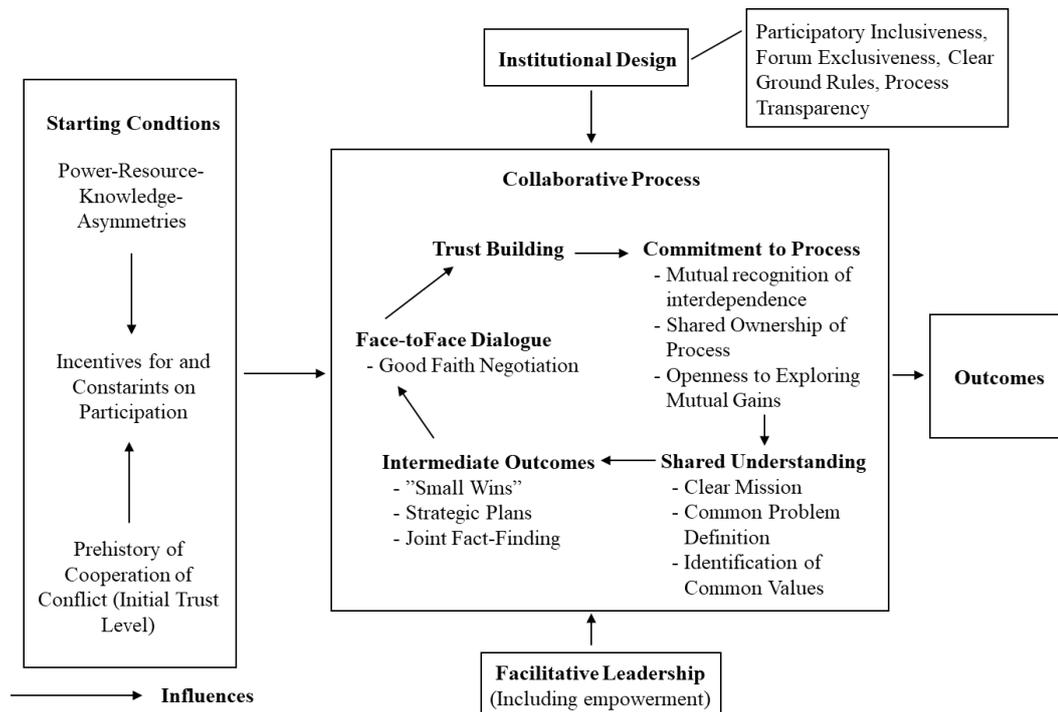
Wildavsky (1997) berpendapat, kolaborasi dan koordinasi melibatkan beberapa dimensi yang berbeda yaitu: 1) kolaborasi melibatkan kerjasama untuk membangun persamaan, meningkatkan kestabilan dan keserasian dan mengharmonisasikan kegiatan antar aktor, 2) kolaborasi menjadi proses musyawarah yang mencakup kesanggupan dalam berkompromi maupun melakukan pertukaran, 3) kolaborasi bisa mengikutsertakan peran *monitoring*, bekerjasama dan berkoordinasi dengan pusat, 4) kolaborasi bisa melibatkan kuasa dan paksaan dalam menetapkan pilihan atau hasil seseorang pada orang lain hingga taraf tertentu melalui kepatuhan dan keterlibatan para aktor, 5) kolaborasi melibatkan komitmen, prospektif perilaku, perencanaan untuk menyelaraskan kegiatan, dan 6) kolaborasi dapat melibatkan pengembangan motivasi dan komitmen internal untuk sebuah program, putusan, dan tujuan organisasi atau strategis (O'Flynn & Wanna, 2008:3-4).

Munculnya *collaborative governance* karena adanya ketergantungan dari tiap-tiap institusi dan adanya kepentingan antar kelompok sehingga mampu memobilisasi berbagai kelompok yang berkepentingan. Apabila dilihat dari aspek kebutuhan lembaga, antarlembaga bekerjasama karena adanya kemampuan yang terbatas dari tiap-tiap lembaga untuk menjalankan program atau kegiatan secara individual dan keterbatasan anggaran sehingga dengan kolaborasi, anggaran bisa masuk dari beberapa lembaga yang terlibat dalam hubungan kolaborasi tersebut.

Collaborative governance lebih menitikberatkan pada aspek aktor yang berkolaborasi dan bekerja secara maksimal untuk mencapai tujuan kolaborasi yang berimplikasi pada pelaksanaan program atau kebijakan yang efektif karena melibatkan relasi organisasi atau institusi. Ansell dan Gash (2008) (dalam Zulkarnaen & Rahim, 2022:17), berpendapat bahwa secara adaptif dan dengan sengaja, *collaborative governance* diciptakan dikarenakan alasan berikut ini disamping mengingat konsep ini penting untuk dilakukan: (1) Kompleksitas dan saling ketergantungan antar institusi, (2) Upaya mendapatkan cara yang baru dalam mencapai legitimasi politik, (3) Konflik yang muncul dari kelompok kepentingan yang sulit dibendung dan bersifat laten (terpendam), (4) Kegagalan di lapangan dalam melaksanakan kebijakan, (5) Ketidakmampuan institusi tertentu karena adanya pemisahan rezim kekuasaan atas wilayah institusi yang lain dengan maksud menghambat putusan, (6) Mobilitas kelompok kepentingan, dan (7) Tingginya anggaran dan politisi regulasi.

1.6.4.1. Model *Collaborative Governance*

Model *collaborative governance* hadir sebagai bentuk dari respon terhadap munculnya permasalahan publik yang semakin rumit dan kompleks, sehingga dibutuhkan peran dari banyak aktor untuk dapat mengatasi persoalan tersebut. Salah satu model *collaborative governance* yang paling terkenal yaitu Model *Collaborative Governance* Ansell dan Gash (2008).



Gambar 1.3 Model Collaborative Governance Ansell dan Gash (2008)

Sumber: Ansell dan Gash (dalam Ullah & Kim, 2020)

Model *collaborative governance* ini diperkenalkan oleh Ansell dan Gash yang di dalamnya terdiri dari dari 4 (empat) dimensi yaitu:

1. Kondisi Awal (*Starting Conditions*)

Menurut Ansell dan Gash (2008) (dalam Djosetro & Hendrik, 2020), kondisi awal adalah tahapan awal dalam membentuk relasi antar *stakeholders* dan mempengaruhi sebelum kolaborasi terjadi. Kondisi awal mengacu pada tingkat dasar kepercayaan, konflik dan modal sosial yang mampu memudahkan atau mencegah kerjasama antar pemangku kepentingan atau antara lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan. Masing-masing *stakeholders* memiliki kepentingan dan tujuan yang berbeda dan memutuskan melakukan kolaborasi untuk mencapai visi, misi dan tujuan bersama. Ansell dan Gash (2008:550)

(dalam Utami, dkk., 2021) menjelaskan bahwa kondisi awal mengacu pada tiga indikator yaitu ketidakseimbangan sumber daya, insentif yang dimiliki pemangku kepentingan, dan sejarah kerjasama.

a. Ketidakseimbangan Sumber Daya

Ketidakeimbangan di dalam kolaborasi seringkali menjadi satu permasalahan yang umum terjadi. Adanya ketidakseimbangan di antara pemangku kepentingan bisa menyebabkan manipulasi oleh pemangku kepentingan yang lebih kuat terhadap pemangku kepentingan yang lemah. Hal ini disebabkan jika salah satu pemangku kepentingan tidak memiliki kapasitas, status, dan sumber daya yang memadai untuk berpartisipasi dalam kolaborasi. Ansell dan Gash (2008:551-552) menyatakan bahwasanya, jika terjadi ketidakseimbangan di antara pemangku kepentingan, maka diperlukan komitmen pemberdayaan terhadap pemangku kepentingan yang lemah atau kurang beruntung.

b. Insentif yang Dimiliki Pemangku Kepentingan

Insentif para pemangku kepentingan sangat penting untuk dipahami dalam suatu kolaborasi, mengingat bahwa partisipasi dari para aktor bersifat sukarela. Insentif berkaitan mengenai apakah proses kolaborasi dapat menghasilkan sesuatu yang berarti bagi para aktor yang terlibat. Ansell dan Gash (2008) menyatakan insentif untuk berpartisipasi akan meningkat apabila para aktor melihat hubungan langsung antara partisipasi para aktor dengan hasil kebijakan yang nyata, konkret, dan efektif. Sebaliknya, akan

menjadi rendah apabila masukan mereka hanya sebagai nasihat atau sebatas seremonial dan bahkan para aktor terlihat hanya mencapai tujuan sepihak.

c. Sejarah Kerjasama

Sejarah kerjasama menjelaskan bagaimana riwayat hubungan yang terjalin di antara pemangku kepentingan sebelum dilakukannya kerjasama. Sejarah kerjasama masa lalu yang baik atau berhasil dapat menciptakan modal sosial dan tingkat kepercayaan yang tinggi sehingga memungkinkan dapat menghasilkan hubungan kerjasama yang lebih baik. Apabila terdapat sejarah konflik, sejarah konflik akan cenderung mengekspresikan diri para pemangku kepentingan pada tingkat kepercayaan yang rendah dan akhirnya dapat memicu rendahnya komitmen dan komunikasi yang tidak jujur. Dengan demikian, Ansell dan Gash (2008) berpendapat bahwa apabila di antara para pemangku kepentingan terdapat sejarah konflik, kemungkinan *collaborative governance* tidak akan terlaksana kecuali adanya interdependensi yang tinggi dan langkah-langkah positif dari para pemangku kepentingan untuk dapat memulihkan tingkat kepercayaan yang rendah.

2. Kepemimpinan Fasilitatif (*Fasilitative Leadership*)

Gitsham dan Page (2014) (dalam Islamy, 2018:132) menyatakan bahwa, kepemimpinan berperan untuk menguraikan secara luas kepada para pemangku kepentingan dalam hubungan kolaborasi mulai dari platform kolaborasi hingga pencapaian tujuan kolaborasi. Kepemimpinan penting untuk mewakili para

pemangku kepentingan yang posisinya lebih lemah. Ansell dan Gash (2008) berpendapat kepemimpinan fasilitatif memegang peranan penting dalam sebuah kolaborasi. Kepemimpinan fasilitatif harus memiliki kemampuan untuk: (1) Memberdayakan para pemangku kepentingan dan menjadi penggerak kegiatan untuk menarik partisipasi para pemangku kepentingan secara aktif dan luas; (2) Memfasilitasi dalam kolaborasi salah satunya dengan menyediakan kebutuhan dalam kegiatan kolaborasi untuk menciptakan kesejahteraan bagi para pemangku kepentingan yang terlibat (3) Menjaga proses kolaborasi berjalan dengan efektif melalui proses pengawasan kegiatan kolaborasi.

3. Desain Institusional

Desain institusional dibutuhkan sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan partisipasi dan transparansi dalam proses kolaborasi. Ansell dan Gash (2008) (dalam Bichler & Losch, 2019) mengakui bahwa desain institusional menjadi bagian dari *collaborative governance* dan menganggapnya sebagai protokol dasar. Dalam hal ini, Ansell dan Gash (2008) mendefinisikan desain institusional adalah aturan dasar dalam berkolaborasi yang sangat penting sebagai legitimasi prosedural dari suatu proses kolaborasi. Desain institusional menegaskan aturan main kolaborasi termasuk aturan siapa yang disertakan, aturan pembentukan forum, bentuk dari aturan kolaborasi yang jelas dan transparansi dalam aturan kolaborasi (Astuti, dkk, 2020:77). Proses desain institusional diharapkan berorientasi kepada konsensus yang disesuaikan dengan kebutuhan yang tepat guna dan tujuan adanya kolaborasi yang dilakukan. Ansell dan Gash (2008:557)

mengemukakan bahwa pentingnya konsensus untuk menciptakan aturan yang jelas, transparan dan meyakinkan bagi pemangku kepentingan yang terlibat (Tilano & Suwitri, 2019). Untuk menjelaskan dimensi ini terdapat indikator yang dapat dilihat dari desain institusional yaitu: (1) Aturan dasar yang jelas yang berbentuk peraturan yang menjadi dasar pelaksanaan kolaborasi baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis dan (2) Transparansi dalam aturan kolaborasi yang merupakan salah satu bentuk adanya aturan yang didasarkan pada kesepakatan bersama.

4. Proses Kolaboratif

Dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008) bahwa proses kolaboratif terdiri dari:

a. Dialog Tatap Muka (*Face to Face Dialogues*)

Segala bentuk dari kolaborasi dibangun dari proses dialog tatap muka yang merupakan proses yang berorientasi pada konsensus. Dialog tatap muka tidak hanya sebagai media dalam melakukan negosiasi di antara pemangku kepentingan, tetapi juga menjadi bagian yang mengawali dari proses membangun kepercayaan, komitmen terhadap proses kolaborasi, dan berbagi pemahaman untuk mencapai hasil dari kolaborasi. Dialog tatap muka dalam kolaborasi setidaknya tidak hanya dilakukan sekali saja tetapi perlu dijalankan secara rutin dan perlu adanya komunikasi yang baik dalam proses dialog tatap muka tersebut untuk memecahkan stereotip dan hambatan yang muncul (Alfiandri, dkk., 2019:44).

b. Membangun Kepercayaan (*Trust Building*)

Kolaborasi bukan hanya sekadar tentang negosiasi antarpihak semata. Kolaborasi menjadi salah satu wujud dari proses saling mengenal dan memahami di antara pemangku kepentingan (Sudirman, dkk., 2022). Upaya dalam membangun rasa kepercayaan perlu dilakukan sejak pertama kolaborasi dilakukan. Ansell dan Gash (2008:558) menyatakan bahwa, membangun kepercayaan tidak hanya dilatarbelakangi karena adanya konflik semata, namun juga dilatarbelakangi dari adanya hubungan yang baik dan riwayat kerjasama di antara pemangku kepentingan. Para pemangku kepentingan tidak bisa menyusun strategi kolaboratif jika para pemangku kepentingan belum bisa menunjukkan adanya keterbukaan dan kontribusi untuk membangun kepercayaan satu dengan lainnya.

c. Komitmen Terhadap Proses (*Commitment to Process*)

Setiap pemangku kepentingan harus mempunyai komitmen yang kuat untuk mencegah berbagai risiko yang kemungkinan muncul. Komitmen yang lemah dari para pemangku kepentingan sering dianggap sebagai masalah khusus dalam kolaborasi. Ansell dan Gash (2008:559) mengungkapkan bahwa partisipasi yang dilakukan oleh para pemangku kepentingan belum tentu disertai dengan komitmen yang kuat, karena komitmen berkaitan dengan keseriusan, keyakinan, dan motivasi para pemangku kepentingan untuk berkolaborasi. Komitmen terhadap proses kolaborasi membutuhkan pengakuan bersama bahwa adanya saling ketergantungan dari para

pemangku kepentingan dan ketaatan terhadap kesepakatan yang telah disepakati bersama.

d. Berbagi Pemahaman (*Shared Understanding*)

Ansell dan Gash (2008) mengemukakan bahwa dalam proses kolaboratif, setiap pemangku kepentingan yang terlibat harus bersedia untuk berbagi pemahaman yang dimilikinya terkait hal yang dapat dicapai oleh para pemangku kepentingan melalui pelaksanaan kolaborasi termasuk berbagi tujuan bersama, tujuan yang jelas, arah dan strategis yang jelas. Dalam pelaksanaan *collaborative governance*, juga penting bagi semua pihak untuk memiliki pemahaman bersama terhadap isu dan permasalahan yang dihadapi bersama-sama sebagai upaya untuk menghasilkan penyelesaian masalah. Dengan saling berbagi pemahaman berimplikasi pada konsensus atau persetujuan dalam menafsirkan dan menguraikan suatu permasalahan.

e. Hasil Sementara (*Intermediate Outcomes*)

Hasil sementara dari proses kolaborasi adalah sebuah keluaran (*output*) yang jelas, nyata, dan konkrit yang diperoleh dari proses yang kritis dan penting dalam mengembangkan momentum yang dapat mengarahkan pada keberhasilan kolaborasi. Dari siklus dan proses yang baik dapat mendorong kolaborasi yang berkelanjutan.

1.6.4.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Collaborative Governance*

Terdapat berbagai faktor keberhasilan yang dapat mempengaruhi dalam implementasi *collaborative governance* dan hal tersebut penting untuk dipahami

secara jelas. Menurut Soedarmo (2010) terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi *collaborative governance* antara lain yaitu:

1. Faktor Struktur Sosial

Faktor struktur sosial adalah faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kolaborasi yang mengacu pada hubungan yang terjalin di antara aktor-aktor (jaringan sosial mereka) dan adanya hubungan timbal balik. Semua yang ikut terlibat di dalam proses kolaborasi tidak diperkenankan membentuk hierarki kekuasaan dan monopoli dari pihak tertentu sehingga dapat menumbuhkan komitmen yang kuat terhadap kolaborasi yang mana tidak hanya sekadar melaksanakan tugas saja tetapi juga memperhatikan proses yang maksimal dalam pekerjaannya. Faktor struktur sosial menjabarkan tiga hal utama yaitu:

- a. Struktur Hierarki

Struktur hierarki menurut Hasan, dkk (2022:162) merupakan jenjang jabatan (pangkat kedudukan), wewenang dari tingkat paling bawah sampai yang paling atas. Adanya struktur hierarki, permasalahan yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan ke dalam kelompok-kelompok sehingga lebih mudah untuk diatur. Struktur hierarki terbagi menjadi dua bentuk yaitu struktur hierarki horizontal dan struktur hierarki vertikal.

- 1) Struktur hierarki horizontal

Fahrudin (2023:176) mengemukakan bahwa struktur hierarki horizontal sebagai struktur hierarki datar dengan lapisan dan jenjang kekuasaan yang lebih sedikit, berorientasi kepada penyelesaian masalah dan memberikan kesempatan bagi lapisan terbawah untuk mengambil

keputusan sehingga pengambilan keputusan akan lebih efektif. Oleh karena itu, struktur hierarki horizontal menjadi struktur yang tepat digunakan dalam hubungan kerjasama.

2) Struktur hierarki vertikal

Struktur hierarki vertikal merupakan struktur hierarki dengan lapisan yang lebih banyak sehingga kewenangan dan hubungan lebih terbatas.

Struktur hierarki vertikal lebih berorientasi kepada proses yang menyebabkan dalam pengambilan keputusan harus menyeluruh dari bagian terbawah dan tentu prosesnya akan lebih memakan waktu.

b. Dominasi Hubungan

Dominasi terjadi apabila terdapat pihak yang lebih dominan dalam suatu hubungan. Fairclough (1995:76) (dalam Subagyo, 2012:8) mengemukakan bahwa, dikatakan pihak tersebut dominan apabila memiliki hegemoni yaitu keunggulan dan dominasi yang melintasi ranah politik, ekonomi, budaya, dan ideologi dalam masyarakat. Bentuk dari hegemoni adalah penyalahgunaan kekuasaan dengan mengendalikan dan memaksa pihak lain demi kepentingan sendiri. Dalam hubungan kolaborasi, sudah seharusnya tidak adanya pihak yang mendominasi.

c. Akseptasi

Sudah seharusnya dalam suatu hubungan kolaborasi, seluruh pemangku kepentingan menerima kehadiran dan partisipasi pemangku kepentingan lainnya sebagai bagian yang satu untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Ketika salah satu pihak tidak dapat menerima kehadiran

pihak lain, dapat memicu hubungan yang tidak harmonis dan terjadi ketidaksepahaman.

2. Faktor Kepentingan Pemerintah

Faktor kepentingan pemerintah merupakan faktor yang erat kaitannya dengan faktor kepentingan politik antar kelompok kepentingan yaitu ada tidaknya kebijakan Pemerintah dan kepentingan lain antar pemegang kepentingan yang telah melibatkan diri dalam hubungan kolaborasi.

a. Kebijakan Pemerintah

Kebijakan Pemerintah diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb), pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.

b. Kepentingan lain di antara pemangku kepentingan

Kepentingan lain muncul karena adanya kesepakatan yang berubah dari kesepakatan kerjasama yang sudah dibentuk, ditetapkan, dan diterima dalam hubungan kolaborasi. Munculnya kepentingan yang lain dari salah satu pemangku kepentingan termasuk dari pemimpin lembaga/kelompok bisa saja memicu terhambatnya suatu program bahkan konflik kepentingan apabila kepentingan tersebut tidak mendorong keberhasilan program yang sedang dijalankan bersama tersebut.

3. Faktor Kultural

Faktor kultural merupakan faktor yang berkaitan dengan kebiasaan dalam hubungan kolaborasi. Faktor kultural juga erat kaitannya dengan keberanian pemangku kepentingan dan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mencapai inovasi dan terobosan. Ketergantungan pada prosedur secara berlebihan dapat menghambat kolaborasi dan tidak menimbulkan kemajuan bagi peningkatan kualitas kolaborasi. Menurut Koentjaraningrat (1990:147) (dalam Suti'ah, 2018:35) menjelaskan bahwa faktor kultural juga berkaitan dengan kultural atau budaya masyarakat yang berupa partisipasi, persepsi atau pandangan, adat istiadat, dan kebiasaan.

1.6.5. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata menjadi satu dari beberapa bentuk industri yang mampu menciptakan *progress* bidang perekonomian dengan cepat terhadap peningkatan penghasilan, penyediaan dalam lapangan pekerjaan, standar hidup dan mendorong berbagai bidang produktivitas yang lainnya. Menurut *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO), pariwisata adalah suatu kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok orang dengan tujuan perjalanan dan menetap di tempat yang berbeda dalam waktu kurang dari setahun untuk kesenangan, usaha, atau keperluan lain (Ompusunggu & Ginting, 2022). Pariwisata merupakan rangkaian kegiatan wisata dengan dukungan dari Pemerintah, masyarakat, dan swasta melalui penyediaan berbagai layanan ataupun fasilitas wisata (Haryanti & Sari, 2017). Dari beberapa pengertian tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa

pariwisata yaitu jenis aktivitas termasuk perjalanan oleh seseorang dengan mengunjungi tempat tertentu yang bukan tempat tinggal biasanya dengan tujuan untuk mencari kebahagiaan atau dikarenakan ada keperluan lainnya yang didukung dengan prasarana maupun layanan yang telah disediakan.

Pinata (2005:56) mengartikan pengembangan pariwisata merupakan suatu aktivitas sebagai upaya dalam mencapai kemajuan atas suatu daerah atau tempat yang dipandang perlu dilakukan penataan dengan baik melalui pemeliharaan terhadap sesuatu yang telah berkembang atau menciptakan sesuatu yang baru (Amelia, dkk., 2019). Dalam menjamin perkembangan pariwisata yang berjalan dengan baik dan secara berkesinambungan yang dapat mewujudkan suatu kebermanfaatan, perlu dilakukan pengkajian secara mendalam terhadap sumber-sumber dan daya pendukung yang ada.

Secara idealnya, pengembangan wisata harus didasarkan pada 4 (empat) prinsip dasar, sebagaimana dikemukakan Purwanto (2002) (dalam Yustinaningrum, 2017) yaitu:

1. Kelangsungan ekologi, yaitu menjamin kelestarian dan perlindungan sumber daya alam yang merupakan daya tarik dari pariwisata misalnya, hutan, laut, pantai, dan sebagainya.
2. Kelangsungan ekonomi, yaitu harus bisa mendatangkan peluang kerja dan mendorong keterlibatan seluruh pihak dalam kegiatan ekonomi dengan melalui sistem perekonomian yang sehat dan berdaya saing.

3. Kelangsungan sosial budaya, yaitu harus bisa memperkuat peran publik dalam *monitoring* tatanan kehidupan berdasarkan nilai-nilai yang dianutnya sebagai identitas masyarakatnya.
4. Melakukan perbaikan dan peningkatan terhadap taraf hidup masyarakat lokal dengan memberikan peluang untuk berpartisipasi dalam upaya mengembangkan pariwisata.

1.6.5.1. Pengembangan Wisata Goa Pindul

Pengembangan potensi lokal dan pemahaman menjadi dasar dalam pengembangan wisata Goa Pindul untuk mensejahterahkan masyarakat dan memprioritaskan manfaat dan keunggulan komperatif baik dari segi sumber daya alam maupun manusia, serta didasarkan atas kemauan dan juga partisipasi publik sebagai sasaran terakhir dari aktivitas pengembangan pariwisata. Dalam pengembangannya juga menitikberatkan pada potensi keindahan alam goa yang tidak terdapat pada wisata lainnya.

1.7. Operasionalisasi Konsep

Operasionalisasi konsep diartikan sebagai proses penguraian konsep penelitian menjadi bagian-bagian yang lebih detail sehingga lebih mudah dipahami dan diukur. Dasar penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep *Collaborative Governance*. Konsep *collaborative governance* merupakan upaya pemerintah untuk membuat keputusan yang ditujukan untuk mengatasi persoalan publik yang kompleks. Untuk mencapai hal ini, pemerintah harus

bekerjasama dengan aktor non-pemerintah dan masyarakat lokal. Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan, yaitu mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, dapat ditelaah lebih lanjut berdasarkan fenomena berikut ini:

1. *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

Collaborative governance dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul dapat diketahui pelaksanaannya melalui empat dimensi yang meliputi:

1.1. Kondisi awal

Kondisi awal merupakan tahap kolaborasi yang menjelaskan bagaimana kondisi di awal sebelum memulai kolaborasi antar *stakeholders* yang dapat mendorong atau menghambat terjadinya kerjasama dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul. Indikator kondisi awal meliputi:

1.1.1. Ketidakseimbangan sumber daya.

1.1.2. Insentif yang dimiliki pemangku kepentingan.

1.1.3. Sejarah kerjasama.

1.2. Kepemimpinan Fasilitatif

Kepemimpinan fasilitatif adalah unsur penting di dalam memfasilitasi para *stakeholders* dan kemampuan mengelola hubungan kolaborasi. Indikator dari kepemimpinan fasilitatif meliputi:

1.2.1. *Leading sector* dalam kolaborasi.

1.2.2. Terdapat upaya dari pemimpin untuk memberdayakan *stakeholders* lain.

1.2.3. Pemimpin sebagai fasilitator dalam kegiatan pengembangan wisata Goa Pindul.

1.2.4. Pengawasan dalam kolaborasi.

1.3. Desain Institusional

Desain institusional adalah aturan dasar dan tata cara dalam hubungan kolaborasi yang telah disepakati oleh para *stakeholders* yang terlibat di dalamnya.

Desain institusional dapat dilihat dari indikator berikut ini:

1.3.2. Aturan dasar.

1.3.3. Transparansi dalam aturan kolaborasi.

1.4. Proses Kolaboratif

1.4.1. Dialog tatap muka

- a. Adanya pertemuan rutin yang membahas tentang pengembangan wisata Goa Pindul.
- b. Membangun komunikasi yang baik dan negosiasi dalam pertemuan.

1.4.2. Membangun kepercayaan

- a. Adanya keterbukaan dalam proses kolaborasi.
- b. Adanya kontribusi yang nyata dari para *stakeholders* yang terlibat.

1.4.3. Komitmen terhadap proses kolaborasi

- a. Adanya kesadaran saling ketergantungan di antara *stakeholders*.
- b. Ketaatan terhadap kesepakatan dalam kolaborasi.

1.4.4. Berbagi pemahaman

- a. Adanya kesamaan tujuan .
- b. Adanya pemahaman bersama terhadap isu dan permasalahan.

1.4.5. Hasil sementara

- a. Hasil nyata yang dihasilkan dari kegiatan kolaborasi.
- b. Terdapat strategi yang disepakati untuk mencapai capaian yang diinginkan.

2. Faktor-faktor yang Mendukung dan Menghambat *Collaborative Governance* dalam Pengembangan Wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul

Terdapat tiga faktor untuk menjawab faktor-faktor yang mendukung dan menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul antara lain yaitu:

2.1. Faktor Struktur Sosial

Faktor struktur sosial menggambarkan hubungan yang terjalin di antara *stakeholders*, sehingga mampu menumbuhkan kesadaran dan komitmen untuk melaksanakan tanggungjawabnya dalam pengembangan wisata Goa Pindul. Untuk menganalisis faktor struktur sosial dapat dilihat dari hal berikut:

2.1.1. Struktur hierarki yang bersifat vertikal atau horizontal.

2.1.2. Hubungan dominasi di antara *stakeholders*.

2.1.3. Para *stakeholders* menerima hubungan kolaborasi.

2.2. Faktor Kepentingan Pemerintah

Faktor kepentingan pemerintah merupakan faktor yang berkaitan erat dengan faktor politik kepentingan di antara pemangku kepentingan. Untuk menganalisis faktor kepentingan pemerintah dapat dilihat dari dua hal berikut:

2.2.1. Adanya kebijakan yang mendukung pengembangan wisata Goa Pindul.

2.2.2. Adanya kepentingan lain di antara *stakeholders* yang berdampak positif bagi pengembangan wisata Goa Pindul.

2.3. Faktor Kultural

Faktor kultural merupakan faktor yang berkaitan dengan kebiasaan dan budaya kerja dari para *stakeholders* yang terlibat pada *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul. Untuk menganalisis faktor kultural dapat dilihat dari hal berikut:

2.3.1 Kemampuan para *stakeholders* dalam mengambil terobosan

2.3.2 Kebiasaan dan pemahaman masyarakat

1.8. Argumen Penelitian

Penelitian ini didasarkan pada keingintahuan peneliti terkait *collaborative governance* di dalam pengembangan salah satu wisata yang ada di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul yaitu wisata Goa Pindul yang

merupakan salah satu objek wisata terkenal, namun ternyata masih ditemui berbagai indikasi permasalahan di dalam hubungan kolaborasi yang terjadi di antara para *stakeholders*. Dengan kemunculan berbagai permasalahan tersebut, penulis berargumen bahwa *collaborative governance* yang terjadi belum berjalan dengan maksimal yang kemungkinan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan kondisi ini akan berpengaruh terhadap keberhasilan dan kegagalan dalam pengembangan wisata Goa Pindul sehingga memunculkan pertanyaan yaitu, Bagaimanakah *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul? dan Faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul? Dari pertanyaan yang menjadi rumusan masalah penelitian tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan mengenai *collaborative governance* yang belum maksimal di dalam pengembangan wisata Goa Pindul.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian berkaitan erat dengan prosedur, alat, teknik, dan desain penelitian yang akan digunakan sebagai syarat mutlak untuk bisa melihat ke dalam suatu penelitian. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian kualitatif dengan jenis penelitiannya yaitu penelitian deskriptif yang ditujukan untuk menghimpun berbagai informasi atas masalah suatu gejala,

fenomena, fakta, realita yang dihadapi yang dilakukan pada kondisi alamiah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lokasi penelitian.

1.9.1. Tipe Penelitian

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memiliki tujuan untuk menerangkan pemecahan dari suatu permasalahan yang didasarkan pada kebenaran atau fakta sosial dengan menggunakan ketersediaan data-data yang ada. Desain penelitian deskriptif digunakan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan penjelasan atau gambaran secara mendalam, sistematis, dan akurat mengenai *collaborative governance* dalam pengembangan wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.9.2. Situs Penelitian

Situs penelitian adalah lokasi yang diambil oleh peneliti untuk merekam keadaan yang sesungguhnya dari fenomena, objek, dan gejala yang diteliti guna mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan. Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat, penelitian akan dilakukan di wisata Goa Pindul Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul.

1.9.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian yakni orang-orang yang akan dimintai keterangannya mengenai suatu fakta atau pendapat yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Moleong (2010:132) (dalam Pratiwi, 2017), subjek penelitian diartikan sebagai informan, yang merupakan sosok dalam latar penelitian yang

dimanfaatkan untuk memberikan suatu informasi mengenai situasi dan keadaan latar penelitian. Peneliti mengartikan subjek penelitian sebagai pelaku atau informan yang menjadi sasaran pengamatan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dan data yang diperlukan oleh peneliti. Untuk mendapatkan informasi dan data yang dibutuhkan secara mendalam dan jelas, dalam penentuan orang yang akan menjadi subjek pada penelitian dilakukan dengan Teknik *Purposive Sampling*.

Purposive Sampling yaitu teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel sumber data yang didasarkan pada suatu pertimbangan seperti, orang yang dinilai dan dianggap paling mengetahui atau memahami mengenai hal yang diharapkan (Helaluddin & Wijaya, 2019:64). Dalam arti lain yaitu, teknik pemilihan sampel dengan memperhatikan kriteria tertentu untuk memilih orang yang diwawancarai yang didasarkan pada informasi yang paling relevan dengan penelitian, yang terlibat dan paling berperan dalam program yang bersangkutan (Barandiarán, dkk., 2019). Penggunaan Teknik *Purposive Sampling* dalam penelitian ini dimaksudkan karena pemilihan informan dilakukan secara terencana dan sengaja yang didasarkan pada kriteria yang ditetapkan sebelumnya dan disesuaikan dengan tujuan dari penelitian yang dilakukan sehingga akan memberikan kemudahan bagi peneliti di dalam melakukan penelusuran situasi yang diteliti. Subjek penelitian yang dipilih dalam penelitian yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Kepala Seksi Informasi dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul

2. Kepala Seksi Jogoboyo Kalurahan Bejiharjo
3. Kepala Urusan Pangripto Kalurahan Bejiharjo
4. Direktur BUMDes Maju Mandiri
5. Ketua Pokdarwis Desa Bejo
6. Masyarakat Desa Bejiharjo

1.9.4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini tidak berupa numerik atau angka, melainkan deskripsi verbal dan pernyataan kata dan frasa yang memberikan gambaran tentang situasi dan fenomena yang ditemui dalam penelitian.

1.9.5. Sumber Data

Arikunto (2006:144) (dalam Mukhtazar, 2020:63) mengartikan sumber data sebagai subyek dari mana data diperoleh. Terdapat 2 (dua) jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi Informasi dan Kerjasama Pariwisata Dinas Pariwisata Kabupaten Gunungkidul, Kepala Seksi Jogoboyo Kalurahan Bejiharjo, Kepala Urusan Pangripto Kalurahan Bejiharjo, Direktur BUMDes Maju Mandiri, Ketua Pokdarwis Desa Bejo, dan Masyarakat Desa Bejiharjo

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari beberapa buku, *website*, penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian dan dokumen dari sumber informan.

1.9.6. Teknik Pengumpulan Data

Tujuan utama melakukan penelitian adalah untuk mendapatkan dan mengumpulkan data yang diperlukan peneliti untuk menyelesaikan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data merupakan langkah mendasar dalam penelitian dan menjadi langkah yang paling strategis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data dengan melakukan dialog dan tanya jawab berdasarkan tujuan tertentu dan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara dilakukan baik oleh pewawancara sebagai penanya maupun responden sebagai orang yang menjawab pertanyaan. Wawancara semi terstruktur (*semi structured interview*) menjadi jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini. Pertanyaan yang diberikan lebih terbuka atau bebas, tetapi tetap terstruktur dengan jelas dan relevan dengan topik penelitian. Sebelum melakukan wawancara, peneliti melakukan penjabaran terhadap pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Untuk melakukan wawancara dibutuhkan alat bantu yang mendukung proses dan hasil data dari wawancara, seperti pedoman

wawancara, buku untuk mencatat, dan alat perekam untuk mendokumentasikan proses dan hasil wawancara.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa masa lalu. Teknik ini digunakan oleh penulis untuk mengumpulkan data dari dokumen yang terdapat pada lokasi penelitian seperti dokumentasi kegiatan, jumlah wisatawan, dan arsip dokumen instansi.

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data maupun informasi dengan menghimpun, mempelajari, dan menganalisis dari berbagai sumber literatur berupa buku, jurnal, majalah, maupun laporan lainnya yang menunjang penelitian yang dilakukan.

1.9.7. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis data merupakan proses pengolahan data menjadi bentuk yang mudah untuk dipahami, dimengerti, dan diinterpretasikan. Agar data yang disajikan lebih mudah dipahami, berikut langkah-langkah kegiatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dari berbagai dokumen berdasarkan kategori yang relevan dengan masalah penelitian, kemudian data dikembangkan melalui penajaman data dengan pencarian data lebih lanjut.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan bentuk analisis melalui penggolongan, pengarahannya, dan pembuangan data yang tidak diperlukan dan mengorganisir data agar dapat dilakukan penarikan kesimpulan final. *Output* reduksi data akan berupa rangkuman catatan-catatan di lapangan (baik catatan awal, perluasan, ataupun penambahan).

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan serangkaian dari informasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Data dapat disajikan dalam bentuk kalimat, skema/gambar, dan tabel.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian atau langkah akhir dari kegiatan analisis. Penarikan kesimpulan bergantung pada besarnya kumpulan catatan tentang data yang ada. Data yang diperoleh dari hasil wawancara dideskripsikan sesuai dengan *interview guide* (pedoman wawancara) dan memiliki fungsi sebagai pelengkap atau memperkuat argumentasi dan pendapat informan yang diwawancarai.

1.9.8. Kualitas Data (*Goodness Criteria*)

Keabsahan data menjadi konsep penting dalam sebuah penelitian. Kualitas data penelitian kualitatif harus diuji melalui keabsahannya, tujuannya agar seluruh data yang telah diperoleh di lapangan dapat dideskripsikan dan dikategorikan sesuai dengan pandangan yang sama sehingga peneliti dapat melakukan

pengecekan ulang atas temuannya dengan melakukan perbandingan dengan berbagai teori, sumber dan metode.

Dalam melakukan uji keabsahan data, digunakan Teknik Triangulasi. Moleong (2010:330) (dalam Sulistiyanto dkk., 2021:96) menjelaskan bahwa triangulasi merupakan teknik yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data dengan menggunakan sesuatu di luar data untuk kepentingan pengecekan dan menjadi pembanding terhadap data-data tersebut. Terdapat 3 (tiga) jenis triangulasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu:

1. Triangulasi sumber adalah uji validitas data dengan mengkaji data dari berbagai sumber yang berbeda
2. Triangulasi waktu adalah pengujian data melalui sumber yang sama dengan waktu yang berbeda.
3. Triangulasi teknik adalah uji kredibilitas data melalui pengecekan data dari sumber yang sama tetapi dengan teknik yang berbeda.

Untuk menguji keabsahan data, jenis teknik triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Triangulasi Sumber dan Triangulasi Teknik. Wawancara tidak hanya dilakukan dengan satu informan saja, tetapi wawancara juga dilakukan bersama informan berbeda yang dilakukan oleh peneliti dengan maksud untuk memperoleh informasi maupun data secara jelas, benar dan sesuai fakta di lapangan. Kebenaran data kemudian dipastikan dengan menganalisis data hasil wawancara berdasarkan kondisi yang ada di lapangan melalui dokumentasi dan studi kepustakaan.